

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA BOJONGMENGGER KEC. CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS

Nina Herlina.¹, Nur Rizqi Arifin², Angga Gumilar³

*Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Galuh¹
Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Galuh²*

*Program Studi Administrasi Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina
Putera Banjar³
e-mail: ninaherlinaaa15@gmail.com*

Abstrak

Masih belum maksimalnya pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD). Dimana tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik. 2) Mengetahui faktor yang menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa Di Desa Bojongmengger ini, tidak terlepas dari kerjasama lembaga yang ada di Desa yaitu dengan Badan Perwakilan Desa atau BPD dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM. Sehingga kualitas penyelenggaraan pembangunan di desa sangat efektif dan memberi kepuasan kepada masyarakat. 2) sumber daya manusia, informasi dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Desa.

ABSTRACT

The management of the Village Fund Allocation is still not maximal in accordance with the objectives of the Village Fund Allocation (ADD). Where the purpose of the Village Fund Allocation (ADD) is to finance the Village Government program in carrying out government activities and community empowerment, so that even distribution of income, work opportunities and business opportunities for rural communities can be increased. This study aims to: 1) Know the Effectiveness of Village Fund Allocation Management (ADD) in Physical Development. 2) Knowing the factors that hinder the Management of Village Fund Allocation (ADD) in Physical Development. The results showed that: 1) In the implementation stages of village fund management and village fund allocation in Bojongmengger Village, it is inseparable from the cooperation of existing institutions in the village, namely the Village Representative Body or BPD and the Community Empowerment Institution or LPM. So that the quality of the implementation of development in the village is very effective and gives satisfaction to the community. 2) human resources, information and community participation.

Keywords: Village Fund Management Functionality, Village Development.

PENDAHULUAN

Pemberian otonomi daerah seluas luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (diskreksi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu, seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju Otonomi Desa.

Hal ini mengingat bahwa dahulu mdesa melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistik oleh satuan instansi pemerintahan. Saat ini Pemerintahan Desa mendapatkan lokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri.

Adapun mengenai keterbatasan Wasistiono dan Tahir (2006) menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu:

1. Kualitas sumberdaya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa.
2. Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan.
3. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.

Hal yang sama dialami oleh pemerintah Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki peran dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bojongmengger, yang tampak dari kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu pengadaan barang untuk pembersihan lingkungan fasilitas umum. Dari Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Bojongmengger nampak adanya pembangunan fisik yang di lakukan seperti pembangunan pengecoran jalan Kip, Posyandu dan pembuatan Balai dusun. Sebagian lagi digunakan sebagai penguatan permodalan usaha para pelaku pedagang kecil atau kelompok-kelompok usaha.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut masih belum maksimal sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam

melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini yaitu: “Efektifitas Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Bojongmenger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis”.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Bojongmenger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik di Desa Bojongmenger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

LANDASAN TEORI

1. Konsep Efektivitas dan Ukuran Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Menurut Mardiasmo (2018), Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan target penerimaan pajak itu sendiri.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2014), yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan

pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

2. Pengertian Pembangunan Desa

Menurut Todaro (1998) pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yang sedang berkembang.

Adapun definisi pembangunan desa menurut para ahli adalah sebagai berikut: Menurut Kartasmita (2001) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.. Suparno (2001) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

Ahmadi (2001) mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Bahwa pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan.

Menurut B.S Muljana (2001) pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah umumnya yang bersifat

infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik ataupun lembaga yang mempunyai kegiatan lain dibidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan.

3. Kajian Empirik

Mahfud (2009) menyatakan sebagian besar penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih banyak diarahkan pada kegiatan fisik (pembangunan sarana dan prasarana fisik) dan penambahan kesejahteraan perangkat desa dalam bentuk dana purna bakti, tunjangan dan sejenisnya serta sebagian lagi untuk kegiatan rutin. Sementara itu, dari aspek realisasi masih ditemui realisasi ADD di bawah 60%..

Kemudian, penelitian Hargono (2011) di Kabupaten Karang Asem Bali menemukan besarnya Alokasi Dana Desa yang diberikan ke setiap desa tidak menggunakan formula yang ditentukan dengan pembobotan tujuh variabel penting desa, tetapi menggunakan pembagian total jumlah desa di Kabupaten untuk penentuan ADDM (ADD Merata) dan pembagian total jumlah banjar dinas untuk penentuan ADDP (ADD proporsional).

Dengan demikian, cara tersebut dinilai tidak adil bagi Desa, sehingga menimbulkan ketidak efektifan penyaluran ADD. Penelitian tentang Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Perekonomian telah dilakukan oleh Prasetyanto (2012), hasil kajiannya menunjukkan ADDmampu meningkatkan kinerja fiskal dan perekonomian daerah, mampu mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan produk domestik regional bruto sektor pertanian.

4. Kerangka Pemikiran

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis

didasarkan pada peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2012 tentang pengelolaan alokasi dana desa. Melalui Alokasi dana Desa, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Dimana tujuan UU Desa adalah menciptakan masyarakat aktif yang mampu menjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa.

Untuk itu, dalam proses pengelolaan alokasi dana desa harusnya pemerintah desa tidak hanya berfokus pada penyelesaian seluruh tahapan pengelolaan alokasi dana desa dan hasil akhir berupa terciptanya pembangunan di desa. Namun pemerintah desa harusnya lebih berfokus pada menciptakan sebuah proses pembangunan yang diciptakan oleh masyarakat desa setempat, sehingga pembangunan yang dihasilkan adalah pembangunan yang berkualitas, yakni sebuah hasil pembangunan yang menggambarkan tujuan, kebutuhan dan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat desa setempat.

Dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada Di Desa Bojongmengger belum sesuai dengan prinsip pengelolaan alokasi dana desa sehingga berdampak belum efektifnya pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa itu sendiri. Hal tersebut utamanya pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Kondisi inilah yang akan diteliti Di Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. terkait dengan bagaimana efektifitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Bojongmengger dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pengelolaan alokasi dana desa

dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian pada saat penelitian dilaksanakan, didasarkan data dan fakta yang ditemui di lapangan untuk kemudian dianalisis dan ditafsirkan, untuk kemudian disimpulkan sehingga menunjukkan masalah yang terjadi. Menurut Sugiyono (2010: 54) bahwa: "Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen, karena kalau variabel independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen)". Teknik analisis data yang digunakan dengan mengukur efektivitas merupakan gambaran kemampuan Pemerintah Desa dalam merealisasi keuangan Alokasi Dana Desa untuk melaksanakan program kegiatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi nilai riil (Abdul Halim, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peraturan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis

Pengelolaan Dana Desa mulai di implementasikan di Indonesia pada tahun 2005 dengan dasar Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa yang kini telah di pertegas dengan lahirnya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Kemudian

dipertegas dengan Peratran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU no. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aturan ini mewajibkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana transfer dari pusat dan di teruskan ke rekening desa yang dikenal dengan Dana Desa (DD).

Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Aturan tentang ADD tahun 2019 tercantm dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 61 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2019. Sehingga Alokasi Dana Desa (ADD) ini merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui rekening desa.

2. Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing merupakan proses pengendalian, pengaturan, dan penyelenggaraan kegiatan dari anggaran dana yang sudah direncanakan di desa untuk keperluan pembangunan baik

fisik dan non fisik sejak perencanaan sampai dilakukan evaluasi apabila ahir tahun anggaran.

Hal ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Bojongmengger agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

Adapun tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam merealisasikan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Tahap perencanaan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksanaan atau kelompok kerja. Proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dari semua elemen masyarakat dalam kegiatan musrembang. Tim pelaksana kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris desa selaku Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), bendahara desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan seluruh unsur masyarakat desa. Musrembang desa bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang

tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat.

Hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan musrembang dalam tahapan perencanaan di Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing sudah memenuhi ketentuan dan menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan musrembang desa tersebut.

Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan musrembang desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Bojongmengger berjalan dengan baik, karena kegiatan musrembang bertujuan untuk mengadakan sosialisasi dalam meningkatkan pembangunan Desa Bojongmengger. Oleh karena itu, secara keseluruhan proses perencanaan kegiatan pengelolaan Dana Desa dan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Bojongmengger yang tertuang dalam DURK tersebut ditentukan secara bersama oleh masyarakat bersama pemerintah desa selaku tim pelaksana penegelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Bojongmengger.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa penyusunan rencana kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang tertuang dalam DURK dapat terselesaikan dengan baik. Sehingga rencana yang dihasilkan berdasarkan aspirasi masyarakat serta transparasi informasi dari pemerintah desa pada tahap pelreencanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing sangat baik.

b. Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di peruntukan untuk pelaksanaan pembangunan fisik berupa infrastruktur fasilitas penunjang masyarakat dan pemberdayaan masyarakat maupun pembangnan non fisik. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 2019, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Dana Desa

Penggunaan Dana Desa untuk berbagai kegiatan pembangunan diuraikan dalam Tabel di bawah ini

Tabel 1. Kegiatan Pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa

No	Uraian	Rencana Anggaran	Realisasi
1	Penyelenggaraan Pos Yandu	17.400.000	17.400.000
2	Penyuluhan & Pelatihan kader kesehatan	5.412.500	5.412.500
3	Peningkatan sarana dan prasarana desa	116.458.500	116.458.500
4	Pengerasan Jalan Desa	217.080.000	217.080.000
5	Peningkatan prasarana jalan desa	42.096.000	42.096.000
6	Peningkatan sumber air bersih milik desa	240.000.000	240.000.000
7	Penyuluhan Bid.hukum	5.921.000	5.921.000
8	Pelatihan Manajemen UMKM	5.908.000	5.908.000
9	Pelatihan pengelolaan Bumdes	5.025.000	5.025.000
10	Rehab kios milik desa	303.534.000	303.534.000
	Jumlah	958.835.000	958.835.000

Sumber: Laporan Realisasasi APBDesa Bojongmengger 2019

Dari tabel 1, diketahui bahwa Dana Desa yang diterima Desa Bojongmengger sebesar Rp 958.835.000 dan digunakan untuk pembangunan fisik dan non fisik.

2) Alokasi Dana Desa

Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk berbagai kegiatan pembangunan diuraikan dalam Tabel di bawah ini

Tabel 2. Kegiatan Pembangunan dari Alokasi Dana Desa

No	Uraian	Rencana Anggaran	Realisasi
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk penghasilan tetap Kepala Desa Dan perangkat Desa serta administrasi desa	557.921.513	557.921.513
2	Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA	5.660.000	5.660.000
3	Pengasuhan Bersama/BKB	3.000.000	3.000.000
4	Informasi Publik Desa	150.000	150.000
5	Peningkatan kapasitas tenaga keamanan desa	6.840.000	6.840.000
6	Koordinasi Kamtibmas desa	240.000.000	240.000.000
7	Penyuluhan Bid.hukum	1.850.000	1.850.000
8	Penyelenggaraan hari keagamaan HUT RI	9.986.600	9.986.600
9	Peningkatan produksi tanaman pangan	1.500.000	1.500.000
10	Penerimaan pembiayaan	185.572	185.572
11	Pengeluaran pembayaran	5.000.000	5.000.000
	Jumlah	602.968.113	602.968.113

Sumber: Laporan Realisasasi APBDesa Bojongmengger 2019

Alokasi Dana Desa yang diperoleh Desa Bojongmengger adalah sebesar Rp. 602.968.113.00(enam ratus dua juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga belas rupiah). Adapun terkait efektivitas Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Bojongmengger baik fisik maupun non fisik sdah tercapai 100 %, sehingga dari hasil analisis sudah mencapai target dari yang sdah diprogramkan.

Informasi yang diperoleh masyarakat terkait tahapan pelaksanaan dalam Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Di Desa Bojongmengger bahwa tingkat partisipasi masyarakat dari setiap tahapan mulai menyusun perencanaan dalam musrenbang sangat baik, yaitu dalam bentuk tenaga ataupun materi dalam mendukung kegiatan pembangunan di Desa. Informasi yang

diperoleh dari masyarakat bahwa dalam kegiatan tersebut banyak sekali partisipasi dari masyarakat untuk mendukung kegiatan tersebut.

Hasil analisis juga menunjukan bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan pemerintah desa sudah transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Transparansi informasi yang dimaksud adalah bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan, pemerintah desa terlebih dahulu memberikan informasi atau meminta partisipasi masyarakat. Kondisi ini yang menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan di desa.

Dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa Di Desa Bojongmengger ini, tidak terlepas dari kerjasama lembaga yang ada di Desa yaitu dengan Badan

Perwakilan Desa atau BPD dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM. Sehingga kualitas penyelenggaraan pembangunan di desa sangat efektif dan memberi kepuasan kepada masyarakat.

c. Tahapan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Dana Desa & Alokasi Dana Desa

Tahapan penyelesaian penyusunan pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan baik fisik maupun non fisik Di Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing dalam tahapan pertanggungjawaban ini sangat efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) di susun oleh pemerintah desa berdasarkan data real di lapangan, serta sudah sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun sebelumnya, sehingga masyarakat mengetahui Laporan Pertanggung Jawaban sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban keuangan ini menjadi bahan penilaian bagi masyarakat agar tidak terjadi kesalah pahaman atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap perangkat desa. Karena semua penyusunan laporan sudah sesuai dengan aplikasi yang digunakan yaitu Sistem Keuangan Desa, dikenal dengan aplikasi Siskeudes.

Berdasarkan hasil analisa Laporan Pertanggung Jawaban ini secara Administrasi dikerjakan oleh perangkat pemerintah Desa Bojongmengger dapat diselesaikan dengan baik. Namun bukan berarti tanpa sepengetahuan masyarakat karena laporan ini berdasarkan kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat Desa Bojongmengger. Maka tahapan

peertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bojongmengger dapat dikatakan sudah sangat efektif.

3. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing

Faktor-faktor yang menghambat pemerintah Desa Bojongmengger dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan baik fisik maupun non fisik tidak terlalu menjadi masalah, karena semua elemen masyarakat sejak menyusun perencanaan pembangunan sudah dilibatkan.

Baik Pemerintah Desa Bojongmengger maupun masyarakat desa mengemukakan berbagai faktor yang menjadi penghambat yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Bojongmengger adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud disini berkaitan dengan jumlah maupun kemampuan pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa harus mempunyai kemampuan yang professional di bidang teknologi informasi agar segala penyusunan perencanaan sampai evaluasi sudah terkoneksi dengan baik.

b. Informasi

Informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa terkait Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa bagi masyarakat masih kurang jelas. Karena masyarakat sebagian besar tidak mengetahui sumber dananya darimana, yang penting bagi masyarakat adalah realitas dari

adanya kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Dari hasil analisa kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dari Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak menjadikan masalah yang besar, melainkan masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dan sudah telaksananya pembangunan yang ada di desa dan dirasakan oleh masyarakat.

c. Partisipasi Masyarakat

Peran serta atau partisipasi masyarakat terhadap Pengelolaan dan Dana Desa Alokasi Dana Desa tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat, karena masyarakat merupakan bagian dari anggota Pemerintahan Desa. Oleh karena itu sebagai Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa beserta aparatur desa perlu menyadari bahwa dalam pengelolaan dan Dana Desa alokasi dana desa dibutuhkan partisipasi masyarakat agar pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dapat dialokasikan sesuai yang di rencanakan dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian sebaga berikut:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Efektif dalam Pembangunan Fisik Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Hal tersebut terlihat dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa Di Desa Bojongmengger ini, tidak terlepas dari kerjasama lembaga yang ada di Desa yaitu dengan

Badan Perwakilan Desa atau BPD dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM. Sehingga kualitas penyelenggaraan pembangunan di desa sangat efektif dan memberi kepuasan kepada masyarakat.

2. Faktor-faktor yang menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik di Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis diantaranya faktor sumber daya manusia, faktor informasi dan faktor partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Halim, Abdul. 2004:93. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah – Edisi revisi. Yogyakarta:Upp AMP YKPN.

Hargono, DS. 2010. Efektifitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat Desa di Kabupaten Karangasem Propinsi Bali.

Kartasasmita, Ginandjar, 2001. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan, Jakarta : Pustaka CIDESINDO.

Mardiasmo, 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta, Andi Miles, Matthew B, A Michael Huberman. (1992). “Qualitative Data Analysis”.

Muljana, B.S. Perencanaan Pembangunan Nasional, Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dengan Fokus Repelita V. Jakarta: UI-Press. 2001

Munandar, M. 2001. Budgeting. Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja. Edisi 1. Cetakan 14. BPFE: Yogyakarta.

- Muntah anah,Siti. Efektifitas
Pengelolaan Keuangan Alokasi
Dana Desa Di Kecamatan
Somagede Kabupaten
Banyumas.jurnal ekonomi.
- Todaro.Michael p. 1979.Pembangunan
ekonomi di dunia ketiga,
terjemahan Haris
Munandar.Jakarta:Erlangga.Edisi
ke enam.
- Undang-Undang Republik Indonesia 32
Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (c.1)
Jakarta, Direktorat Jendral
Otonomi Daerah.